



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

***Correspondence:**

briyan.efflin@staff.uty.ac.id

DOI: [10.22219/jrak.v14i2.30123](https://doi.org/10.22219/jrak.v14i2.30123)

Citation:

Junaidi, Syahputra., B. E., Sela, E. I., Mahsun, M. (2024). Kualitas Laporan Keuangan Desa: Sebuah Studi Di Kabupaten Boyolali. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 14(2), 308-325.

Article Process

Submitted:

November 11, 2023

Reviewed:

April 1, 2024

Revised:

May 12, 2024

Accepted:

May 29, 2024

Published:

June 4, 2024

Office:

Department of Accounting
University of Muhammadiyah Malang
GKB 2 Floor 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, East Java,
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

Article Type: Research Paper

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA: SEBUAH STUDI DI KABUPATEN BOYOLALI

Junaidi¹, Briyan Efflin Syahputra^{2*}, Enny Itje Sela³,
Mohamad Mahsun⁴

Affiliation:

^{1,2} Fakultas Bisnis & Humaniora, Universitas Teknologi
Yogyakarta, Sleman, Indonesia

³ Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Teknologi
Yogyakarta, Sleman, Indonesia

⁴ Jurusan Akuntansi, STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta,
Indonesia

ABSTRACT

Purpose: This study examines how financial management and asset management affect the quality of village financial reports in Boyolali Regency, Central Java.

Methodology/approach: In order to gather research data, surveys and questionnaires were employed as the primary method and instruments in this quantitatively oriented study. This study also employed the FGD method to generate the question items/indicators included in the questionnaire. 252 village administrations from the Boyolali Regency participated in this study as respondents. Moreover, survey data was analyzed using multiple regression analysis.

Findings: The quality of village financial reports has been demonstrated to be positively impacted by both asset and financial management.

Practical implications: The findings of this study can serve as a valuable foundation and point of reference for regional administrations and associated parties, particularly for village administrations across Indonesia, so they can create high-quality village financial reports.

Originality/value: The research model used in this study is still relatively rare in Indonesia. This study has simultaneously analyzed the influence of financial management and asset management factors in order to improve the quality of village financial reporting.

Keywords: Asset Management; Financial Management; Quality of Financial Reports.



ABSTRAK

Tujuan penelitian: Untuk menganalisis pengaruh dari pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Metode/pendekatan: Penelitian ini utamanya dilaksanakan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan survei dan kuesioner sebagai metode dan alat yang dimanfaatkan untuk memperoleh data penelitian. Dalam rangka untuk menghasilkan item pertanyaan/indikator yang digunakan dalam kuesioner, penelitian ini turut memanfaatkan metode FGD. Responden dari penelitian ini ialah 252 pemerintah desa, yang tersebar di Kabupaten Boyolali. Adapun analisis regresi berganda telah digunakan pada penelitian ini, dengan tujuan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui survei.

Hasil: Pengelolaan keuangan maupun pengelolaan aset, masing-masing telah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Implikasi praktik: Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dan referensi penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya bagi pemerintah desa di seluruh Indonesia, agar mampu menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas

Orisinalitas/kebaharuan: Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih tergolong jarang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini telah menganalisis secara bersamaan mengenai pengaruh dari faktor pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan; Pengelolaan Aset; Pengelolaan Keuangan.

PENDAHULUAN

Riset tentang kualitas pelaporan keuangan di Instansi Pemerintah, khususnya di Pemerintah Desa masih sangat menarik untuk dilakukan hingga saat ini. Terlebih, sejak diberlakukannya [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa, yang menetapkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan bagi Pemerintah Desa, untuk mulai mengelola secara mandiri dana desa yang akan disalurkan di setiap tahunnya. Bahkan, jika merujuk informasi yang diperoleh dari [Kemenko PMK \(2023\)](#), setidaknya sejak tahun 2015 hingga 2023 saja, Pemerintah Pusat telah menyalurkan dan mengalokasikan dana desa kepada seluruh Pemerintah Desa di Indonesia mencapai Rp538 Triliun.

Melihat tingginya jumlah dana yang telah disalurkan tersebut, tidak heran jika kemudian banyaknya pihak yang mulai menyoroji kinerja dari Pemerintah Desa dalam menghasilkan

maupun menyajikan sebuah laporan keuangan yang benar dan berkualitas (sesuai dengan standar/pedoman) atas penggunaan dana desa tersebut. Bahkan tidak sedikit banyak pihak yang mulai pesimis dan ragu. Mengapa? Hal ini dikarenakan munculnya fakta-fakta di lapangan, yang masih menunjukkan adanya fenomena atas belum optimalnya peran dan fungsi dari Pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan hingga menghasilkan laporan keuangan atas penggunaan dana desa yang sesuai dengan standar. Adapun beberapa fenomena yang dimaksud antara lain: (1) masih adanya laporan dari Pemerintah Daerah, yang menunjukkan adanya beberapa Pemerintah Desa yang masih terlambat dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban, atas penggunaan bantuan keuangan yang telah diberikan secara rutin oleh Pemerintah Daerah ([Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2022](#); dan [Puspasari & Purnama, 2018](#)); (2) banyaknya perangkat desa, yang hingga saat ini telah disinyalir dan bahkan telah ditetapkan/dijadikan sebagai tersangka atas beberapa kasus korupsi penggunaan dana desa ([Sofyani & Pratolo, 2022](#)). Bahkan mengacu pada data yang didapatkan dari ICW (*Indonesian Corruption Watch*) selama periode 2015 hingga 2018 saja, telah ada 214 kepala desa yang telah terjerat dalam kasus korupsi atas penggunaan dana desa, dengan total kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar ([Zakariya, 2020](#)); (3) masih banyaknya perangkat desa yang terindikasi belum mampu menyampaikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar maupun peraturan yang berlaku. Hal ini turut didukung atas informasi yang disampaikan oleh BPKP RI, yang menyatakan bahwa, masih perlu dibenahinya pencatatan pengelolaan keuangan desa di Indonesia ([Ramalan, 2022](#)); dan yang terakhir ialah (4) masih banyaknya kasus penyelewengan dana desa, yang bentuk realisasinya tidak sesuai dengan anggaran ([Sari et al., 2021](#)).

Berbagai fenomena di atas secara gamblang telah menunjukkan berbagai indikasi atas ketidakmampuan Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan dengan baik/benar atas dana desa yang telah disalurkan tersebut. Fenomena di atas juga sekaligus semakin mempertegas masih rendahnya kualitas laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh beberapa Pemerintah Desa selama ini, termasuk yang terjadi pada beberapa Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali ([Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, 2021](#)). Padahal, jika melihat dari sisi pedoman, pemerintah sebenarnya sudah menerbitkan beberapa peraturan, yang seharusnya dapat menjadi acuan rinci, yang dapat memandu setiap Pemerintah Desa agar dapat secara mandiri menghasilkan sebuah laporan keuangan, yang penyusunannya sesuai dengan standar. Adapun pedoman yang dimaksud ialah [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018](#) tentang pengelolaan keuangan desa.

Menyimpulkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa, masih menjadi fenomena yang perlu mendapatkan banyak perhatian oleh banyak pihak, tidak terkecuali bagi Pemerintah hingga bagi para peneliti. Hal ini dikarenakan, masih perlu ditemukannya berbagai faktor potensial yang sekiranya perlu diperhatikan, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada suatu Pemerintah Desa.

Merujuk pada beberapa literasi terdahulu, diketahui bahwa terdapat dua aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada suatu instansi, termasuk bagi Pemerintah Desa. Adapun kedua aspek yang dimaksud ialah faktor pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset ([Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016](#); dan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018](#)).

Mengacu pada [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018](#), dapat diketahui bahwa “pengelolaan keuangan yang baik” dapat diartikan sebagai proses

pengelolaan keuangan yang selalu melandaskan proses pengelolaannya dengan berbagai asas utama seperti transparansi dan akuntabilitas. Maka dari itu, merujuk pada definisi tersebut, pada prinsipnya pengelolaan keuangan yang baik, dapat dinyatakan sebagai proses pengelolaan keuangan, yang selalu mengutamakan konsep demokrasi dalam pengelolaannya, dimana semua transaksi dan keputusan keuangan yang terjadi pada suatu instansi harus dicatat, dipantau, dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat atau kepada pihak lain yang berkepentingan (penerapan asas transparansi) ([Nair et al., 2019](#); [Yupita et al., 2020](#); [Ahmad et al., 2020](#); [Tran et al., 2021](#); [Wahyudi et al., 2021](#); [Darwis et al., 2022](#); dan [Panjaitan & Adam, 2022](#)). Selain itu, masih melanjutkan definisi sebelumnya, maka pada prinsipnya pengelolaan keuangan yang baik, dapat dinyatakan juga sebagai proses pengelolaan keuangan yang dalam prosesnya akan menuntut setiap pengelolanya agar mampu mengelola keuangan pada instansinya tersebut dengan baik, bebas dari penyalahgunaan, terbebas dari indikasi ketidakjujuran, bebas dari tindakan korupsi dan bebas dari berbagai kesalahan dalam pengelolaannya (penerapan asas akuntabilitas) ([Wulaningrum & Pinanto, 2020](#); [Muraina & Dandago, 2020](#); dan [Gaspar et al., 2022](#)). Maka, melihat berbagai penjelasan sebelumnya, sangat wajar sekali jika terdapat beberapa peneliti terdahulu yang turut menyetujui bahwa pengelolaan keuangan yang baik (transparan dan akuntabel) dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada suatu instansi, termasuk bagi pemerintah desa. Adapun beberapa peneliti yang dimaksud ialah [Abdullah & Nainggolan \(2019\)](#), [Oino \(2019\)](#); [Sandra \(2019\)](#); dan [Herindraningrum & Yuhertiana \(2021\)](#), yang secara bersama-sama telah menunjukkan bahwa transparansi maupun akuntabilitas memiliki hubungan yang positif dengan kualitas pelaporan keuangan, termasuk kualitas pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Akan tetapi, pada penelitian yang dilaksanakan oleh [Leunupun et al. \(2022\)](#), [Zubaidah & Nugraeni \(2023\)](#) dan [Nuroniyah \(2024\)](#), masih menunjukkan hasil atau kondisi yang sebaliknya. Maka dari itu, adanya ketidakconsistenan hasil tersebut, semakin menegaskan bahwa riset yang berfokus untuk memastikan kembali mengenai efektivitas dari faktor pengelolaan keuangan, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan masih perlu dilakukan.

Masih melanjutkan penjelasan sebelumnya, aspek kedua yang berpotensi dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa ialah pengelolaan aset. Aset sendiri jika dilihat dari definisi, fungsi dan perannya, dapat dikategorikan sebagai komponen penting dalam suatu laporan keuangan, termasuk bagi laporan keuangan desa. Bahkan, pengelolaan aset yang baik, justru dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada suatu desa. Selain karena dapat dicatat dan dilaporkan dengan tepat (sesuai dengan nilai yang sesungguhnya - akuntabel) pada laporan keuangan ([Purnamawati & Adnyani, 2021](#)), pengelolaan yang baik atas aset desa, ternyata juga berpotensi untuk meningkatkan kinerja desa tersebut, dalam rangka untuk memuaskan dan memenuhi harapan setiap *stakeholder*-nya. Hal ini dikarenakan, pengelolaan yang tepat berpotensi menyebabkan aset tersebut mampu menjadi sumber harta kekayaan desa, yang dapat meningkatkan perolehan pendapatan pada desa tersebut. Hingga kemudian, secara tidak langsung pengelolaan aset desa yang baik, sangat mampu meningkatkan perekonomian suatu desa secara keseluruhan ([Sujana et al., 2020](#); dan [Sara & Saputra, 2021](#)).

Jika didefinisikan, pengelolaan aset yang baik menunjukkan bahwa setiap aset yang dimiliki oleh suatu instansi dapat tercatat dengan akurat, sistematis dan lengkap. Pencatatannya, tentu harus mencakup informasi yang menunjukkan asal usul, nilai, pemeliharaan dan depresiasi atas aset yang dimiliki. Sehingga jelas, aset yang telah tercatat dan dinilai dengan benar tersebut, dapat memastikan bahwa laporan keuangan pada suatu instansi telah mencerminkan nilai aset yang sesungguhnya, hingga kemudian berdampak pada relevansi dan peningkatan keandalan atas laporan keuangan tersebut. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya, pengelolaan yang baik atas aset, artinya aset tersebut telah dirawat dan digunakan secara optimal (Wang et al., 2023; dan Petchrompo & Parlikad, 2019). Tentu, aset yang dirawat dengan baik dan benar, dapat menjadikan umur dari aset tersebut dapat bertahan lebih lama, dan berpotensi untuk memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi. Selain itu, jika dimanfaatkan dengan optimal, berpotensi menyebabkan aset tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien, hingga kemudian dapat mengurangi biaya operasional dan memaksimalkan peran aset tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada suatu instansi (Bicen & Aras, 2023). Tentu, berbagai penjelasan atas manfaat dari pengelolaan aset tersebut, akan tergambar dan tercermin dengan jelas pada laporan keuangan. Sehingga, sangat masuk akal jika kemudian disimpulkan bahwa pengelolaan aset yang baik, akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelaporan keuangan pada suatu instansi, termasuk bagi pemerintah desa. Hal ini juga senada dan telah diindikasikan melalui beberapa penelitian terdahulu, seperti Sujana et al. (2020), Sagitarini et al. (2022), Kusmariyanto et al. (2022), dan Muhlisoh et al. (2023). Namun, pada penelitian yang dilaksanakan oleh Rizky et al. (2023), dan Poae et al. (2017) masih menunjukkan indikasi atau hasil yang sebaliknya. Masih adanya ketidakonsistenan hasil tersebut, semakin menegaskan dan mendorong untuk dipilihnya variabel pengelolaan aset dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan, dalam rangka untuk memastikan dan membuktikan kembali efektivitas dari faktor pengelolaan aset dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.

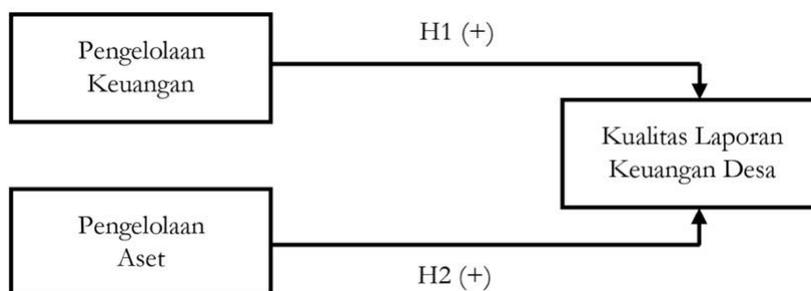
Dalam rangka untuk semakin memperkuat dan membangun hipotesis dalam penelitian ini, maka teori *stewardship* telah digunakan dalam penelitian ini. Menurut Chrisman (2019) dan Kyere & Ausloos (2020), teori *stewardship* merupakan sebuah teori yang dapat menjelaskan perilaku dan keinginan dari para *agent* (pihak manajemen) dalam suatu institusi, yang akan senantiasa melakukan berbagai tindakan yang dibutuhkan untuk memenuhi setiap tujuan yang memang diharapkan oleh para *principal*, yang merupakan pemilik dari institusi yang dikelola oleh pihak *agent* tersebut. Lebih lanjut Chrisman (2019) dan Kyere & Ausloos (2020) menjelaskan bahwa, teori ini juga menunjukkan dan menjelaskan adanya keinginan dari para manajemen/pihak *agent* yang akan senantiasa untuk menyelaraskan tujuan pribadinya, agar selaras dan sejalan dengan tujuan dari instansi yang dikelolanya (tujuan *principal*), hingga kemudian dapat terjalin kerja sama yang baik (yang diharapkan) di antara pihak *agent* dan *principal*. Mengacu pada beberapa penjelasan sebelumnya terkait teori ini, maka pada prinsipnya, penelitian ini telah menggunakan teori *stewardship* tepatnya melalui penggunaan faktor pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, untuk menawarkan solusi dalam rangka untuk memenuhi harapan dari para *stakeholder* (sebagai *principal*) dari berbagai Pemerintah Desa di Indonesia, yang mengharapkan agar perangkat Pemerintah Desa tersebut (selaku *agent*) kedepannya, dapat semakin cakap/terampil dan mampu untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku.

Melihat dari berbagai penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset desa, dapat menjadi dua faktor yang sangat potensial untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada suatu desa. Selain itu, dari berbagai penjelasan sebelumnya, dapat juga dirumuskan 2 hipotesis, yang pada akhirnya perlu diuji kembali pada penelitian ini terkait keefektifannya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Terlebih variabel yang dipilih dalam penelitian ini (pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset), masih menunjukkan hasil dan kondisi yang tidak konsisten. Berikut kedua hipotesis yang dimaksud:

H1: *Pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa*

H2: *Pengelolaan aset berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa*

313 Selanjutnya, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka berikut merupakan kerangka konseptual penelitian ini, yang dapat dilihat melalui Gambar 1 berikut.



Gambar 1.
Kerangka
Konseptual

Dalam rangka untuk menguji kedua hipotesis tersebut, penelitian ini telah menargetkan seluruh Pemerintah Desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, agar kemudian dapat menjadi responden dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi alasan utama atas dipilihnya desa tersebut, dikarenakan masih banyaknya ditemui fakta di lapangan (berdasarkan laporan yang disampaikan Inspektorat Kabupaten Boyolali), yang masih menunjukkan adanya beberapa Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali, yang ternyata belum maksimal dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangannya dengan baik, sesuai dengan standar yang berlaku ([Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, 2021](#)). Padahal, secara regulasi dan pedoman, Pemerintah Kabupaten Boyolali sendiri telah menerbitkan [Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa](#), yang seharusnya mampu menjadi petunjuk dan pedoman penting bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali, untuk dapat menyusun dan menghasilkan laporan keuangan desa, yang disusun berdasarkan standar (artinya berkualitas).

Hasil dari penelitian ini, tentu sangat diharapkan dapat menjadi salah satu referensi tambahan dan penting, dalam rangka untuk membantu Pemerintah Desa di seluruh Indonesia, agar kedepannya semakin memahami dan memperhatikan berbagai faktor yang terbukti dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa.

METODE

Penelitian ini utamanya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, dalam rangka untuk menguji hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini. Selain itu, kuesioner juga digunakan dalam penelitian ini sebagai alat yang dimanfaatkan untuk memperoleh data utama penelitian. Responden yang ditargetkan dari penelitian ini ialah seluruh Pemerintah Desa yang tersebar di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Perlu diketahui bahwa satu Pemerintah Desa dalam penelitian ini, hanya mengisi satu eksemplar kuesioner saja, yang pengisiannya telah dilakukan oleh perwakilan dari Pemerintah Desa yang menjadi responden, tepatnya ialah kepala urusan keuangan desa. Sebagai tambahan, penelitian ini turut memanfaatkan metode tambahan yaitu FGD (*Focus Group Discussion*), sebagai metode yang dimanfaatkan dalam penelitian ini, dalam rangka untuk menentukan item pertanyaan/indikator serta pembobotannya yang telah digunakan dalam kuesioner penelitian ini.

FGD dalam penelitian ini telah dilaksanakan sebelum digelarnya penyebaran kuesioner. Adapun proses FGD-nya terdiri atas dua tahap: (1) menyusun terlebih dahulu rancangan draf item pertanyaan atas kuesioner, yang disusun mengacu pada [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018](#); dan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016](#); (2) berdasarkan draf item pertanyaan yang telah disusun pada tahap sebelumnya, kemudian pada *expert* yang dihadirkan dalam FGD mulai berdiskusi (menggunakan *professional judgement*) untuk menentukan item pertanyaan final yang telah digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini. FGD pada tahap kedua ini juga sekaligus dilakukan, dalam rangka agar *expert* yang dihadirkan dapat menentukan pembobotan pada item kuesioner tersebut (menggunakan *professional judgement* dari para *expert*), yang sangat diperlukan untuk mengukur variabel pada penelitian ini. Adapun dalam FGD yang dimaksud, penelitian ini telah melibatkan para ahli keuangan dan petugas inspektorat di Kabupaten Boyolali.

Model Penelitian

Model yang telah diungkapkan dalam penelitian ini, antara lain:

$$KLKD = a + b_1PKD + b_2PAD + e$$

Dimana:

KLKD= Kualitas laporan keuangan desa

PKD= Pengelolaan keuangan desa

PAD=Pengelolaan aset desa

a= konstanta

b1...b2= koefisien regresi

e= *error*

Definisi Operasional Variabel

Variabel pengelolaan keuangan pada penelitian ini didefinisikan sebagai kepatuhan perangkat desa/pihak terkait dalam rangka untuk mengikuti peraturan/regulasi yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan desa, kualitas pencatatan keuangan desa, termasuk rekonsiliasi bank dan pencatatan atas semua transaksi yang terjadi dalam suatu pemerintahan desa. Selain itu, pengelolaan keuangan dalam penelitian ini juga mencakup terkait dengan ketepatan dan kecepatan proses pelaporan keuangan desa, baik itu terkait dengan laporan realisasi anggaran maupun laporan keuangan akhir tahun.

Variabel pengelolaan aset pada penelitian ini dikaitkan dengan kualitas atas pencatatan aset desa, termasuk di dalamnya ialah terkait dengan penyusunan inventaris aset desa, pembangunan infrastruktur desa yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pengawasan dan pemeliharaan aset desa dalam rangka untuk menjaga agar kondisi aset dalam keadaan baik, terjaga serta dapat dioptimalkan dalam penggunaannya.

Variabel kualitas laporan keuangan desa pada penelitian ini dikaitkan dengan tingkat kepatuhan suatu perangkat desa dalam menjalankan aturan dan regulasi terkait dengan penyusunan laporan keuangan desa, akurasi, dan kesesuaian antara jumlah yang tercatat dengan jumlah sebenarnya (realisasi) dalam pencatatan laporan keuangan desa, dan keterbacaan serta kejelasan dalam penyusunan laporan keuangan desa, sehingga kemudian dapat mudah dipahami oleh berbagai pihak yang memang membutuhkannya.

Setiap item pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini diisi oleh responden menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5, dengan rincian: 1 artinya “sangat tidak sesuai”, 2 yang artinya “tidak sesuai”, 3 artinya “kurang sesuai”, 4 artinya “sesuai”, dan terakhir 5 artinya “sangat sesuai”.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini utamanya digelar untuk menguji dan menganalisis secara empiris (pendekatan kuantitatif) atas setiap hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini. Maka dari itu, aplikasi SPSS telah dimanfaatkan dalam penelitian ini, sebagai alat bantu untuk mengolah atas hasil pengisian kuesioner dalam penelitian ini.

Terdapat beberapa tahap pengujian maupun analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertama, ialah pengujian instrumen, untuk melihat nilai validitas maupun nilai reliabilitas atas kuesioner dalam penelitian ini. Kedua, adalah pengujian model penelitian melalui uji asumsi klasik, dan yang terakhir ialah pengujian hipotesis melalui analisis regresi ([Kafle, 2019](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil FGD

FGD pada penelitian ini dimanfaatkan sebagai metode tambahan, dengan tujuan utama untuk menentukan item-item pertanyaan pada kuesioner penelitian ini. Dalam prosesnya, FGD dalam penelitian ini telah melibatkan dan menghadirkan beberapa ahli keuangan dan petugas dari Inspektorat Kabupaten Boyolali.

FGD dalam penelitian ini, telah dilaksanakan sebelum dilakukannya survei (sebagai metode utama penelitian ini) kepada seluruh Pemerintah Desa yang tersebar di Kabupaten Boyolali. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 tahapan utama dalam pelaksanaan FGD penelitian ini. *Pertama*, ialah menyusun rancangan draf (sementara) item pertanyaan yang nantinya digunakan pada kuesioner. Rancangan draf tersebut menjadi dasar/acuan utama bagi para *expert* yang telah dihadirkan pada saat FGD, dalam rangka untuk berdiskusi dalam menentukan item-item final atas pertanyaan kuesioner (pada tahap selanjutnya), yang telah digunakan pada kuesioner penelitian ini. Adapun penyusunan rancangan draf item pertanyaan tersebut, baik untuk variabel pengelolaan keuangan maupun pengelolaan aset, telah disusun mengacu pada referensi dari [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018](#) dan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016](#).

Kedua, setelah rancangan draf atas item-item pertanyaan kuesioner berhasil disusun, maka tahap selanjutnya, para *expert* yang diundang dalam FGD mulai berdiskusi untuk membahas rancangan draf tersebut. Menggunakan *professional judgement*-nya, para *expert* tersebut telah memutuskan bahwa terdapat 88 indikator/item pertanyaan (versi final) yang telah digunakan sebagai item pertanyaan pada kuesioner penelitian ini. Adapun ke-88 indikator tersebut secara mendetail terdiri atas 80 item/indikator untuk variabel pengelolaan keuangan, sedangkan sisanya merupakan item/indikator untuk variabel pengelolaan aset. Sebagai tambahan, ke-80 indikator/item yang telah digunakan dalam rangka untuk mengukur variabel pengelolaan keuangan yang telah ditentukan oleh para *expert* tersebut, diketahui telah disusun dan ditentukan oleh para *expert* menjadi 6 aspek (mengacu pada [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018](#)). Detailnya ialah untuk aspek legal sebanyak 4

indikator, perencanaan sebanyak 14 indikator, pelaksanaan sebanyak 33 indikator, penatausahaan sebanyak 21 indikator, pertanggungjawaban sebanyak 4 indikator, dan pelaporan sebanyak 4 indikator.

Pada tahap kedua tersebut, diketahui juga bahwa para *expert* yang hadir, juga sekaligus telah berdiskusi dengan menggunakan *profesional judgement*-nya, untuk memberikan pembobotan untuk masing-masing aspek/indikator yang telah ditetapkan sebelumnya (item untuk variabel pengelolaan keuangan maupun aset). Proses pembobotan tersebut dilakukan dengan tujuan, untuk memberikan bobot atas setiap jawaban (diisi dengan skala jawaban 1-5) pada saat responden telah mengisi kuesioner pada penelitian ini. Hasil pembobotan itulah, yang dijadikan sebagai data untuk melakukan pengujian penelitian ini secara empiris, dengan bantuan aplikasi SPSS. Adapun hasil pembobotan yang dimaksud tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1.
Proporsi
Pembobotan
(Scoring)

Variabel	Aspek	Indikator	Proporsi bobot	Total bobot
Pengelolaan Keuangan	Legal	4	5%	80%
	Perencanaan	14	10%	
	Pelaksanaan	33	40%	
	Penatausahaan	21	25%	
	Pertanggungjawaban	4	10%	
	Pelaporan	4	10%	
Pengelolaan aset		8		20%
Total		88		100%

Berdasarkan Tabel 1, untuk mengukur variabel pengelolaan keuangan, *scoring* yang dapat diberikan ialah maksimal 80%, sedangkan sisanya ialah *scoring* maksimal untuk variabel pengelolaan aset. Adapun hasil total akumulasi dari variabel pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset (sesuai proporsi *scoring*), digunakan sebagai data untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan, yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini.

Hasil Survei

Setelah item pertanyaan kuesioner berhasil disusun (melalui hasil FGD), maka tahap selanjutnya yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini ialah survei, dengan menjadikan kuesioner (hasil FGD sebelumnya) sebagai alat untuk mengumpulkan data. Berdasarkan dari pelaksanaan survei yang telah dilakukan, telah diperoleh sebanyak 252 eksemplar hasil pengisian kuesioner, yang telah diisi oleh 252 Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Perlu diketahui penelitian ini hanya berhasil memperoleh responden sebanyak 252 Pemerintah Desa saja (dari 22 Kecamatan) dari total 261 Pemerintah Desa yang tersebar di Kabupaten Boyolali. Adapun statistik deskriptif atas pengisian kuesioner oleh responden dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Statistik
Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Pengelolaan Keuangan	252	39	80	67,080	5,686
Pengelolaan Aset	252	4	20	9,293	2,295
Kualitas Laporan Keuangan	252	47	100	72,320	6,802

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

317

Pengujian validitas maupun reliabilitas dilakukan dalam rangka untuk memberikan sebuah keyakinan bahwa instrumen yang digunakan secara tepat dapat mengukur variabel yang sedang diukur, dan terdapat konsistensi dalam sebuah variabel ([Rizky et al., 2023](#)). Berdasarkan hasil pengujian validitas maupun reliabilitas dalam penelitian ini, dapat disimpulkan dan diyakini bahwa item-item pertanyaan maupun variabel dalam penelitian ini, masing-masing telah memenuhi syarat pengujian validitas (artinya setiap item memiliki nilai signifikansi yang lebih rendah/lebih kecil dari 0,05), dan turut memenuhi syarat uji reliabilitas (artinya nilai *cronbach's alpha* untuk setiap variabel dalam penelitian ini, lebih besar/lebih tinggi dari 0,06) ([G. Rizky et al., 2023](#)).

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap variabel independen dengan variabel independen lainnya pada sebuah penelitian (tepatnya pada model regresi) tidak berkorelasi (tidak adanya gejala multikolinearitas) ([Alosani & Al-Dhaafri, 2021](#)). Menurut [Alita et al. \(2021\)](#) suatu penelitian dapat dikatakan bebas dari gejala multikolinieritas apabila: (1) telah memiliki nilai *tolerance* yang jauh lebih besar dari 0,10; dan (2) memiliki nilai VIF, yang lebih rendah dari 10,0. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan (lihat Tabel 3), dipastikan bahwa tidak adanya gejala multikolinearitas dalam penelitian ini.

Tabel 3.
Uji

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengelolaan Keuangan	0,876	1,141
Pengelolaan Aset	0,876	1,141

Uji Heterokedastisitas

Uji selanjutnya ialah uji heterokedastisitas. Uji ini harus dilakukan dalam rangka untuk memastikan kembali bahwa data-data yang diolah dalam sebuah penelitian bersifat homogen. Adapun salah satu cara untuk melakukan pengujian ini ialah melalui uji glejser ([Meiryani et al., 2022](#)). Berdasarkan Tabel 4 (hasil pengujian glejser), dapat dipastikan bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini lebih besar/lebih tinggi dari 0,05. Sehingga disimpulkan tidak ada gejala heterokedastisitas dalam penelitian ini.

Tabel 4.
Uji

Variabel	t	Sig
Pengelolaan Keuangan	-0,009	0,993
Pengelolaan Aset	0,024	0,981

Heterokedastisitas

Koefisien Determinasi

Dalam rangka untuk melihat seberapa kuat pengaruh dari variabel independen dalam sebuah penelitian dalam mempengaruhi variabel dependen, maka perlu diperlukan pengujian determinan ([Suki & Salleh, 2018](#)). Berdasarkan Tabel 5, didapati informasi bahwa penelitian ini memiliki nilai *r square* sebesar 0,987. Nilai tersebut telah menunjukkan bahwa faktor/variabel pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset dalam penelitian ini, telah

mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan sebesar 98,7%. Adapun sisanya, diyakini telah dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya.

Tabel 5.
Hasil Uji
Determinan

<i>Model</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,987 ^a	0,974	1,107

Uji Model (Uji F)

Uji F dilakukan dengan tujuan utama untuk melihat dan membuktikan, ada atau tidaknya pengaruh dari setiap variabel/konstruk independen (baik secara simultan atau bersama-sama) terhadap variabel/konstruk dependen pada sebuah penelitian (Zulkarnain & Ningrum, 2020). Adapun Tabel 6, telah menyajikan hasil uji F pada penelitian ini. Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa variabel pengelolaan keuangan maupun aset pada penelitian ini, baik secara simultan ataupun bersama-sama telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil/lebih rendah dari 0,05).

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Regression	11309,572	2	5654,786	4616,051	0,000 ^b
Residual	305,032	249	1,225		
Total	11614,603	251			

Tabel 6.
Hasil Uji F

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
Konstanta	2,139	0,823		2,599	0,010
Pengelolaan Keuangan	0,963	0,013	0,809	73,754	0,000
Pengelolaan Aset	1,032	0,033	0,348	31,729	0,000

Tabel 7.
Hasil Uji Regresi

Uji Hipotesis dan Pembahasan

Pengelolaan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 7 telah menyajikan hasil regresi dari penelitian ini. Mengacu pada Tabel 7 tersebut, disimpulkan bahwa, secara empiris/statistik, hipotesis pertama pada penelitian ini telah terbukti dan didukung oleh data (memiliki nilai signifikansi yang lebih rendah/lebih kecil dari 0,05).

Artinya dapat disimpulkan bahwa faktor pengelolaan keuangan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Adapun jika merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, ternyata hasil dari penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian Herindraningrum & Yuhertiana (2021); dan Ga et al. (2022) yang turut membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi (pengelolaan keuangan yang baik) memiliki peran dan pengaruh untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, termasuk bagi instansi pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

Terbuktinya hipotesis pertama pada penelitian ini, semakin menegaskan dan menunjukkan bahwa pemanfaatan faktor pengelolaan keuangan dapat menjadi “solusi yang tepat” (sejalan

dengan teori *stewardship*), yang memang dibutuhkan oleh para perangkat dari sebuah Pemerintahan Desa, agar kedepannya dapat menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dalam rangka untuk memenuhi harapan dan keinginan dari para pemangku kepentingan. Menurut [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018](#), setidaknya terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan/diterapkan oleh para perangkat Pemerintah Desa, agar kedepannya dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik, yang tentunya dapat berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan desa yang dihasilkan. Adapun contoh aspek yang dimaksud seperti: (1) aspek perencanaan, mencangkup adanya kepastian bahwa sebuah pemerintahan desa harus mampu dan senantiasa menyusun rencana sumber penerimaan dan pengeluaran desa, yang tersaji dalam APB Desa di setiap periodenya; (2) aspek pelaksanaan, yang mengharapkan pemerintahan desa untuk dapat melaksanakan pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran desa, dengan memanfaatkan rekening kas Desa pada sebuah bank, yang secara resmi memang ditunjuk oleh Pemerintah terkait; (3) aspek penatausahaan, yang merekomendasikan agar penatausahaan keuangan desa untuk dapat dilakukan oleh pejabat terkait (yaitu Kaur Keuangan), yang memang telah ditugasi sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan pada suatu Pemerintahan Desa; (4) aspek pelaporan, yang merekomendasikan agar Pemerintah Desa untuk dapat melakukan pelaporan secara rutin pelaksanaan APB Desa kepada pejabat terkait; dan (5) aspek pertanggungjawaban, yang merekomendasikan bahwa setiap Pemerintahan Desa harus mampu menyerahkan laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan atas realisasi APB Desa kepada pejabat terkait di setiap tahunnya ([Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018](#)).

Melalui hasil dari penelitian ini, sangat diharapkan juga bahwa seluruh Pemerintah Desa di Indonesia (tidak hanya di Kabupaten Boyolali saja), untuk dengan cermat memastikan agar setiap perangkat desa yang ditugaskan, agar mampu dengan baik mengelola semua transaksi keuangan yang terjadi. Pastikan semua transaksi keuangan yang dikelola telah menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas. Bahkan untuk memastikan hal tersebut, rasanya sangat mungkin bagi pemerintah desa untuk sedikit berinvestasi, dalam rangka untuk mengikutsertakan secara rutin/berkala staf yang ditugasi untuk mengelola keuangan dan menyajikan laporan keuangan, pada berbagai pelatihan di bidang keuangan dan akuntansi. Hal ini semata-mata untuk menjaga kompetensi staf tersebut, hingga kemudian mampu mengelola keuangan pada Pemerintah Desa dengan baik, hingga kemudian laporan keuangan yang disajikan dapat disusun sesuai dengan standar maupun peraturan yang berlaku (kualitasnya terjamin).

Pengelolaan Aset dan Kualitas Laporan Keuangan

Masih merujuk pada hasil regresi yang tersaji pada Tabel 7, dapat dipastikan bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini telah terbukti atau telah didukung oleh data (secara statistik didukung, dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05). Artinya, sama halnya dengan faktor pengelolaan keuangan, ternyata faktor pengelolaan aset turut terbukti berpengaruh secara signifikan dan positif, dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. Adapun perlu diketahui juga bahwa, hasil yang diperoleh melalui penelitian ini, ternyata juga mendukung dan selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh [Abdullah & Nainggolan \(2019\)](#); [Kaharrukmi & Adli \(2022\)](#); dan [Sukma et al. \(2023\)](#) yang diketahui telah menunjukkan bahwa pengelolaan aset, berperan penting dan berpengaruh untuk meningkat kualitas laporan keuangan, termasuk bagi Pemerintah Desa).

Terbuktinya hipotesis kedua pada penelitian ini, semakin menegaskan bahwa faktor pengelolaan aset yang baik turut menjadi solusi yang tepat (sejalan dengan teori *stewardship*), yang seharusnya diperhatikan oleh para perangkat dari sebuah Pemerintahan Desa, agar kedepannya mampu untuk menyusun sebuah laporan keuangan yang berkualitas, dalam rangka untuk memenuhi keinginan dari para pemangku kepentingan. Adapun dalam rangka untuk mewujudkan hal tersebut (mampu untuk mengelola aset desa dengan baik), maka terdapat beberapa hal atau aspek, yang patut diperhatikan oleh para pengelola dari Pemerintah Desa kedepannya, seperti memastikan bahwa semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa telah tercatat dengan benar, adanya pengawasan atas setiap penggunaan aset yang dimiliki, adanya pemeliharaan yang rutin dan berkala atas setiap aset yang dimiliki desa, kemampuan perangkat desa untuk mengoptimalkan penggunaan aset yang dimiliki, dan lain sebagainya ([Petchrompo & Parlikad, 2019](#); [Sujana et al., 2020](#); dan [Wang et al., 2023](#)). Sementara itu jika mengacu pada [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016](#), dalam rangka agar suatu pemerintah desa mampu untuk melakukan pengelolaan aset yang baik dan benar, maka terdapat beberapa aspek yang harus dicermati oleh perangkat desa tersebut, seperti: (1) perencanaan, yaitu memastikan adanya perencanaan terkait kebutuhan aset yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan desa); (2) pengadaan, yaitu memastikan pengadaan aset yang direncanakan, dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang transparan, efektif, efisien, bersaing, tidak diskriminatif/adil, dan tentunya akuntabel; (3) penggunaan, yaitu memastikan aset desa memang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa; (4) pemanfaatan, yaitu memastikan sepanjang penggunaannya, aset memang dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut; (5) pengamanan, yaitu memastikan adanya keamanan aset desa yang dilihat dari berbagai aspek, seperti kejelasan terkait administrasi aset, pengamanan fisik aset agar tidak hilang atau mengalami penurunan fungsi dan lain sebagainya; (6) pemeliharaan, yaitu memastikan bahwa perangkat desa secara rutin telah melakukan pemeliharaan aset; (7) penghapusan, yaitu memastikan bahwa penghapusan aset desa dari buku data inventaris desa, telah dilaksanakan dengan sejumlah alasan yang jelas, seperti beralih kepemilikan, pemusnahan (misalnya dikarenakan nilai ekonomis aset sudah habis), atau sebab lain (8) pemindahtanganan, yaitu memastikan bahwa pemindahtanganan aset desa dapat dilakukan dengan beberapa alasan yang jelas, seperti dikarenakan aset sudah tidak memiliki nilai ekonomis untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa, sehingga kemudian aset tersebut dijual; (9) penatausahaan, yaitu memastikan bahwa aset telah diinventarisir di dalam buku inventaris aset desa, dengan diberikan kodefikasi yang jelas; dan (10) penilaian, yaitu memastikan bahwa proses inventarisasi dan penilaian atas kepemilikan aset milik Pemerintah Desa, sesuai dengan peraturan maupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SIMPULAN

Penelitian ini dilaksanakan/digelar untuk menganalisis pengaruh dari faktor pengelolaan keuangan dan aset terhadap kualitas pelaporan keuangan desa. Responden dari penelitian ini ialah 252 Pemerintahan Desa, yang tersebar di 22 Kecamatan pada Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Adapun berdasarkan hasil dari pengujian secara statistik/empiris pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, baik faktor pengelolaan keuangan maupun pengelolaan aset, masing-masing telah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dan penting, yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pimpinan Pemerintahan Desa dan pihak lainnya yang terkait, pada saat akan menyusun berbagai regulasi, keputusan maupun kebijakan yang memang

diperlukan, dalam rangka untuk memastikan bahwa perangkat desa yang ditugaskan, dapat semakin terampil dan berkompoten dalam mengelola keuangan maupun aset milik desa, yang kemudian dapat berdampak positif dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan desa yang dapat dihasilkan oleh perangkat desa tersebut kedepannya. Adapun yang menjadi keterbatasan utama atas penelitian ini, ialah dikarenakan penelitian ini belum mampu menjangkau seluruh Pemerintah Desa yang tersebar di Kabupaten Boyolali, untuk dijadikan responden. Seperti yang diketahui, penelitian ini hanya mampu memperoleh 252 Pemerintah Desa (dari total 261 Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali), yang kemudian berkenan untuk mengisi kuesioner dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini baru mengungkap dua variabel yang diduga memengaruhi kualitas laporan keuangan desa yaitu pengelolaan keuangan dan aset. Penelitian selanjutnya dapat mengungkap beberapa faktor potensial lainnya seperti faktor SDM dan pengendalian internal yang turut diduga berpotensi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kemdikbud Ristek RI yang telah mendanai pelaksanaan penelitian ini melalui hibah penelitian tahun anggaran 2023. Selain itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Boyolali yang telah banyak membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Tata Kelola Aset Daerah (Studi pada Kantor Badan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 118–126. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.4383>
- Ahmad, J., Nonci, N., Nurmandi, A., Purnomo, E. P., & Agustiyara. (2020). What Factors Affect Financial Transparency Reports? A Study of Regional Government Financial Reports in South Sulawesi Province, Indonesia. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(4), 525–544. <https://doi.org/10.35808/ijeaba/604>
- Alita, D., Putra, A. D., & Darwis, D. (2021). Analysis of Classic Assumption Test and Multiple Linear Regression Coefficient Test for Employee Structural Office Recommendation. *Indonesian Journal of Computing and Cybernetics System*, 15(3), 295–306. <https://doi.org/10.22146/ijccs.65586>
- Alosani, M. S., & Al-Dhaafri, H. S. (2021). An Empirical Examination of The Relationship Between Benchmarking, Innovation Culture, and Organisational Performance using Structural Equation Modelling. *The TQM Journal*, 33(4), 930–964. <https://doi.org/10.1108/TQM-02-2020-0034>
- Bicen, Y., & Aras, F. (2023). Smart Asset Management System for Power Transformers Coupled with Online and Offline Monitoring Technologies. *Engineering Failure Analysis*, 154(107674), 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2023.107674>
- Chrisman, J. J. (2019). Stewardship Theory: Realism, Relevance, and Family Firm Governance. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 43(6), 1051–1066. <https://doi.org/10.1177/10422587198384>
- Darwis, H., Ohorella, R. W. U., & Zainuddin. (2022). Transparency and Accountability of

Regional Financial Management Accessibility of Financial Statement as A Moderation. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(9), 243–249. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i9.2066>

- Ga, L. L., Pau, S. P. N., & Muga, M. P. L. (2022). The Influence of Accountability and Transparency on the Quality of GMIT's Financial Reports in Kupang City. *Kontigensi: Scientific Journal of Management*, 10(2), 241–246. <https://doi.org/10.56457/jimk.v10i2.286>
- Gaspar, M. R., Gabriel, J. P., Manuel, M. B., Ladrillo, D. S., Gabriel, E. R., & Gabriel, A. G. (2022). Transparency and Accountability of Managing School Financial Resources. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(2), 102–115. <https://doi.org/10.5296/jpag.v12i2.20146>
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Literature Review. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>
- Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. (2021). *Penyusunan Laporan Keuangan Desa Sesuai Standar Akuntansi. Ikarang Akuntan Indonesia*. [https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/RPSC Panel III Ibu Lilik Subagiyo Paparan Inspektur AAIPI 2021.pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/RPSC_Panel_III_Ibu_Lilik_Subagiyo_Paparan_Inspektur_AAIPI_2021.pdf)
- Kafle, S. C. (2019). Correlation and Regression Analysis Using SPSS. *Management, Technology & Social Sciences*, 1(1), 126–132.
- Kaharrukmi, D., & Adli, A. (2022). The Effect of Budget Execution Performance and Asset Management Performance on the Quality of Financial Statements Moderated by Disclosure of Financial Statements (Empirical Study on Ministry of Public Works and Housing). *Saudi Journal of Economics and Finance*, 6(3), 87–97. <https://doi.org/10.36348/sjef.2022.v06i03.001>
- Kemenko PMK. (2023). *Penguatan Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://www.kemendkopmk.go.id/penguatan-pemerintahan-untuk-meningkatkan-kualitas-pembangunan-desa#:~:text=Kapasitas pemerintah Desa serta kreatifitas,kurang lebih Rp. 538 Triliun>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018).
- Kusmariyanto, H., Titisari, K. H., & Astungkara, A. (2022). Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus di Dinas Pariwisata Surakarta). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(1), 963–968. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.675>
- Kyere, M., & Ausloos, M. (2020). Corporate Governance and Firms Financial Performance in the United Kingdom. *International Journal of Finance & Economics*, 26(2), 1871–1885. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1883>
- Leunupun, P., Persulesy, G., & Souhuwat, M. (2022). Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuanga terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2364–2376. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884>

- Meiryani, Tandyopranoto, C. D., Emanuel, J., Lindawati, A. S. L., Fahlevi, M., Aljuaid, M., & Hasan, F. (2022). The Effect of Global Price Movement on The Energy Sector Commodity on Bitcoin Price Movement During The Covid-19 Pandemic. *Heliyon*, 8(e10820), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10820>
- Muhlisoh, F. Z., Kurhayadi, & Sucipto, B. (2023). The Influence of Regional Asset Management and Internal Control Systems on the Quality of Financial Reporting in the Bandung City Education Department. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi*, 7(3), 607–619. <https://doi.org/10.36555/jasa.v7i3.2402>
- Muraina, S. A., & Dandago, K. I. (2020). Effects of Implementation of International Public Sector Accounting Standards on Nigeria's Financial Reporting Quality. *International Journal of Public Sector Management*, 33(2/3), 323–338. <https://doi.org/10.1108/CG-12-2018-0378>
- Nair, R., Muttakin, M., Khan, A., Subramaniam, N., & Somanath, V. S. (2019). Corporate Social Responsibility Disclosure and Financial Transparency: Evidence From India. *Pacific-Basin Finance Journal*, 56, 330–351. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.06.015>
- Nuronyah, R. E. (2024). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 1417–1430. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5032>
- Oino, I. (2019). Do Disclosure and Transparency Affect Bank's Financial Performance? *Corporate Governance*, 19(6), 1344–1361. <https://doi.org/10.1108/CG-12-2018-0378>
- Panjaitan, R., & Adam, E. (2022). Transparency of Hajj Fund Accountability: Performance of Financial Statements and Investment Optimization. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 14(1), 47–62. <https://doi.org/10.26740/jaj.v14n1.p47-62>
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (2018).
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2022). *Tak Serahkan Laporan Keuangan 2021, Pemerintah Desa Tak Bisa Cairkan Bantuan Keuangan 2022*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tak-serahkan-laporan-keuangan-2021-pemerintah-desa-tak-bisa-cairkan-bantuan-keuangan-2022/>
- Petchrompo, S., & Parlikad, A. K. (2019). A Review of Asset Management Literature on Multi-Asset System. *Reliability Engineering & System Safety*, 181, 181–201. <https://doi.org/10.1016/j.res.2018.09.009>
- Poae, Y., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 8(1), 159–169. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15356>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2014).
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. S. (2021). Urgensi Tat Twam Asi Dalam Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 46–58. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.03>
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145–159.

- Ramalan, S. (2022). *BPKP Ungkap Masalah Pengelolaan Keuangan Desa, Ini Penyebabnya*. Okezone News. <https://economy.okezone.com/read/2022/05/20/320/2597625/bpkp-ungkap-masalah-pengelolaan-keuangan-desa-ini-penyebabnya>
- Rizky, A., Marzuki, Sulaiman, & Andini, R. S. (2023). Pengaruh Perencanaan, Penilaian, Penatausahaan dan Pengawasan serta Pengendalian Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.38062/jpab.v4i1.444>
- Rizky, G., Puterisari, D. U., & Yustisi, Y. P. (2023). Daya Tarik Perusahaan dan Kompetensi Karir yang Memengaruhi Niat Melamar Pekerjaan pada Mahasiswa Tingkat Akhir. *Jurnal Ekombis Review*, 11(2), 1317–1328. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.3792>
- Sagitarini, Y. A., Mukoffi, A., Wikardojo, S., & Himawan, S. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa di Desa Sumbersekar. *Jurnal Magister Akuntansi Trisaksi*, 9(1), 73–88. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2018-0277>
- Sandra, Z. (2019). Principles of Transparent Financial Reporting as The Basis of Financial Statements Quality Control. *Poslovna Ekonomija*, 13(2), 60–68. <https://doi.org/10.5937/poseko16-24566>
- Sara, I. M., & Saputra, K. A. K. (2021). Manajemen Aset Sebagai Wujud Implementasi Tata Kelola Desa dan Pengidentifikasian Aset Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 204–213. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.515>
- Sari, R., Muslim, M., & Sari, M. M. (2021). The Role of Internal Control System on Characteristics of Village Financial Reports. *Jurnal Akuntansi*, 25(2), 239–255. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i2.808>
- Sofyani, H., & Pratolo, S. (2022). Do Accountability and Transparency Promote Community Trust? Evidence from Village Government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397–418. <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070>
- Sujana, E., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. H. (2020). Internal Control Systems and Good Village Governance to Achieve Quality Village Financial Reports. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9), 98–108.
- Suki, N. M., & Salleh, A. S. A. (2018). Mediating Effect of Halal Image on Muslim Consumers' Intention to Patronize Retail Stores: Some Insights from Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 9(2), 1759–1833. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0014>
- Sukma, A. M., Hidayat, A. I., & Susanty, A. (2023). Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Aspek Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 239–252. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.02.20>
- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The Role of Accountability in Determining The Relationship Between Financial Reporting Quality and The Performance of Public Organizations: Evidence from Vietnam. *Journal of Accountability Public Policy*, 40(106801), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106801>

- Wahyudi, M., Huda, N., Herianingrum, S., & Ratnasari, R. T. (2021). Zakat Institution of Financial Transparency Model: An Explanatory Research. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(2), 122–141. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.9358>
- Wang, K.-J., Basuki, S. S. A., & Kurniati, N. (2023). A Life-Cycle Asset Management Model by Response Surface Method Based Optimization. *International Journal of Production Economics*, 263(108957), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2023.108957>
- Wulaningrum, P. D., & Pinanto, A. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.18196/jati.030122>
- Yupita, L., Setiawina, N. D., & Utama, M. S. (2020). Transparency As A Strategy Of Social Welfare Institutions To Keep The Existence(Study of the Angel Hearts Bali Foundation). *Journal of Critical Reviews*, 7(18), 987–992.
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenai Modus Operandi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>
- Zubaidah, A. N., & Nugraeni. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*, 7(3), 978–988. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475>
- Zulkarnain, & Ningrum, D. A. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 197–211. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1161>